

Beberapa Fokus Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2022 #1

1

Akurasi penyajian saldo akun LKPP untuk memastikan kelengkapan konsolidasi saldo dari LKKL dan LKBUN serta eliminasi dan reklasifikasi di tingkat LKPP

Akurasi penyajian anggaran dan realisasi serta kecukupan pengungkapan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam pasal 13 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

2

3

Implementasi Sistem Aplikasi SAKTI secara penuh pada tahun 2022 mencakup antara lain: (1) migrasi saldo awal; (2) risiko penyelesaian data anomali; (3) pencatatan transaksi tahun berjalan; dan (4) risiko lainnya yang terkait dengan implementasi Sistem SAKTI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Beberapa Fokus Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2022 #2

4

Kecukupan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang terdampak dengan adanya:

- (1) likuidasi lima entitas pelaporan dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); dan
- (2) likuidasi Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH

Keterjadian, kelengkapan, hak, penilaian, dan pengungkapan penerimaan serta utang dan piutang perpajakan, PNBP, dan Pendapatan BLU

5

6

Keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, dan klasifikasi atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, dan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penganggaran dan pelaksanaan masing-masing belanja

KOMITMEN, APRESIASI DAN HARAPAN PEMERINTAH

KOMITMEN PEMERINTAH



Implementasi SAKTI mulai pelaporan keuangan tahun 2022.



Implementasi PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi.



Pembinaan kepada seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan temuan berulang.



Implementasi kebijakan *Treasury Deposit Facility* untuk tujuan pengelolaan kas Pemda menjadi lebih optimal.



Tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya agar secara komprehensif dan efektif dapat menyelesaikan poin permasalahan.

APRESIASI PEMERINTAH



2016



2017



2018



2019



2020



2021

Pemerintah memperoleh opini WTP 6 tahun berturut-turut

HARAPAN PEMERINTAH



Komunikasi dan kerja sama yang efektif antara Pemerintah dan BPK dapat terus **dipertahankan**